

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Akuntansi Sektor Publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba secara sederhana, Akuntansi Sektor Publik ini banyak di gunakan oleh organisasi sektor publik, seperti puskesmas, rumah sakit, masjid, partai politik, sekolah, atau universitas, lembaga swadaya masyarat dan Pemerintah pusat (Erlina, 2015). Menurut Prof. Indra Bastian Ph.D dalam modulnya yang berjudul “Lingkup Akuntansi Sektor Publik”, Akuntansi Sektor Publik dapat disimpulkan sebagai salah satu aliran dari manajemen keuangan publik, termasuk di dalamnya makroekonomi, mobilisasi pendapatan, penganggaran, realisasi anggaran, dan audit, telah dijabarkan menurut perspektif akuntansi.

Akuntansi Sektor Publik Daerah merupakan proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas Pemerintah Daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang di perlukan oleh pihak eksternal (Dwi Ratmono 2015). Kewajiban lembaga publik memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas) terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah tersebut. Upaya Pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum (Fardiana Ichalina 2019). Akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban tersebut

diharapkan masyarakat terwujud dalam pengelolaan keuangan Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good governance*), Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi Pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah otonom memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan semua sektor pembangunan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut. Akuntabilitas laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini laporan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan laporan keuangan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pengguna laporan keuangan. Selain melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas dapat dikatakan efektif apabila informasi terkait dalam laporan keuangan tersebut mudah diakses oleh publik. Dimana masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah kepada Pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas (Ferdiana Ichalina 2019).

Pengelolaan keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 yang meliputi struktur APBD, Penyusunan rancangan APBD, Penetapan APBD, Penyusunan dan Penetapan bagi Daerah yang belum memiliki DPRD. Termasuk di dalamnya pengelolaan kas, penatausahaan keuangan Daerah, akuntansi keuangan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Daerah, kerugian Daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Ada juga dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (Pasal 1), Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong seluruh kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah untuk tidak cepat puas dengan raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit laporan keuangan mereka oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kenyataannya, meski mendapat status WTP, masih banyak kepala Daerah yang tersangkut kasus korupsi. Banyak di Daerah yang dapat WTP, tapi korupsinya tetap jalan, kata Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Kementerian Keuangan, Kamis (20/9/2018). Sri Mulyani Indrawati menjelaskan “masih banyak kementerian/lembaga serta pemda yang setelah dapat WTP merasa itu sudah cukup. Padahal, predikat WTP bukanlah tujuan akhir. Jika laporan keuangan kementerian/lembaga atau pemda meraih predikat WTP, mereka harus mengevaluasi kembali apa-apa saja yang bisa dimaksimalkan lagi untuk efisiensi anggaran”.

Evaluasi bisa menasar pada aspek perencanaan kegiatan hingga pengambilan keputusan-keputusan strategis. Laporan keuangan itu harusnya dipakai sebagai alat untuk *feed back* membuat perencanaan yang lebih baik. Perbaikan pengelolaan negara bertujuan meningkatkan kualitas penggunaan keuangan negara yang lebih baik. Menurut Sri Mulyani Indrawati, jika setiap kementerian/lembaga dapat menggunakan anggaran secara efektif, pelaksanaan APBN pun akan jadi jauh lebih baik yang pada akhirnya menguatkan pertumbuhan ekonomi. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan, khususnya dari temuan-temuan BPK terhadap laporan keuangan yang telah diaudit. Temuannya itu misalnya pencatatan aset yang tidak tertib. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sri Mulyani : Banyak Laporan Keuangan Daerah WTP, tapi Kepala Daerahnya Korupsi (2018).

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan kewenangannya berjalan diatas kebijakan, standar, norma, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat sehingga arah pembangunan tetap terjaga pada satu tujuan yaitu Tujuan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, untuk menjalankan roda pembangunan di Daerah tersebut maka dibentuklah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dengan mengacu kepada tiga fungsi Pemerintahan Daerah yaitu melakukan tugas Pemerintahan, tugas pembangunan dan tugas pelayanan

masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi diatas pemerintah Daerah memberdayakan berbagai sumber dana baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi maupun Dana Bagi Hasil, oleh karena itu Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan yang menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut dalam hal ini adalah DPRD dan masyarakat luas.

Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintahan dan harus memiliki ukuran standar pengelolaan serta standar ketercapaian sasaran target pembangunan dan inilah yang lazim disebut dengan istilah *Good governance*. Sehingga penting untuk meneliti persoalan ini, mengingat banyak pengelolaan keuangan Daerah baik itu Kota/kabupaten juga masih kurang transparansi, akuntabilitas dan sulit diawasi dari kacamata masyarakat luas. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti hal tersebut di Pemerintah Kota Bekasi, dikarenakan peneliti bertempat tinggal di wilayah tersebut dan belum pernah diteliti sebelumnya.

Pada penelitian Muhammad Alqodri (2015) dan Gerryan Putra (2017) menyimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Sedangkan pada variabel pengawasan memiliki hasil yang berbeda. Pada Muhammad Alqodri (2015) pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, namun Gerryan Putra (2017) pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai pengaruh pengawasan keuangan terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alqodri (2015) penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salomi J. Hehanussa (2015) yang memberikan bukti empiris

bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan Daerah.

Penelitian tentang hubungan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan telah banyak dilakukan dan terdapat hasil yang berbeda-beda, diantaranya Muhammad Alqodri (2015), Rizky Rasmana Hanafiah (2016), dan Gerryan Putra (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitian dan objek penelitian. Objek penelitian yang di bahas yaitu SKPD Kota Bekasi Muhammad Alqodri (2015) meneliti di Kota Dumai. Rizky Rasmana Hanafiah (2016) meneliti di Kabupaten Aceh Utara dan Gerryan Putra (2017) meneliti di Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti mengambil judul untuk permasalahan di atas adalah **“PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN, TRANSPARANSI, PENGAWASAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI (PERIODE TAHUN 2015-2018)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis memformulasi rumusan masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Akuntabilitas Keuangan Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan daerah Di Pemerintah Kota Bekasi?
2. Apakah Transparansi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan daerah Di Pemerintah Kota Bekasi?
3. Apakah Pengawasan Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan daerah Di Pemerintah Kota Bekasi?
4. Apakah Penyajian Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan daerah Di Pemerintah Kota Bekasi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan daerah Di Pemerintahan Kota Bekasi.
2. Untuk Mengetahui Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan daerah di Pemerintahan Kota Bekasi.
3. Untuk Mengetahui Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan daerah Di Pemerintahan Kota Bekasi.
4. Untuk Mengetahui Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Bekasi.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat kepada:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Pengembangan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu Akuntansi Sektor Publik khususnya tentang pengelolaan keuangan Daerah.

2. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Dalam hal ini pengguna anggaran atau SKPD diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, koreksi dan untuk perbaikan didalam implementasi pengelolaan keuangan Daerah terutama bagi Pemerintah Kota Bekasi.